KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pesta narkoba di rutan Depok, komisi XIII desak aparat usut tuntas
Tanggal : Minggu, 11 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pesta Narkoba Di Rutan Depok

Komisi XIII Desak Aparat Usut Tuntas

SENAYAN geram dengan dugaan pesta narkoba di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Depok, Jawa Barat (Jabar) yang melibatkan 22 warga binaan. Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada pihak yang diduga terlibat secara langsung. Senayan mendesak rantai masuknya barang terlarang tersebut perlu dibongkar untuk mengetahui apakah ada pihak lain yang terlibat.

Anggota Komisi XIII DPR Franciscus Sibarani mengatakan, fakta adanya dugaan keterlibatan pegawai membuat pengusutan perlu melihat lebih jauh dari sekadar pengguna atau penyedia di dalam rutan. Tapi rangkaian peristiwa sejak narkoba diperoleh hingga dapat digunakan di dalam rutan perlu dipetakan secara menyeluruh.

"Kalau ada akses dari orang dalam, kita perlu tahu bagaimana akses tersebut digunakan dan apakah ada mata rantai lain di belakangnya. Itu yang perlu dibongkar secara tuntas," tegas Sibarani di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Sebelumnya, pesta narkoba sekelompok narapidana di rutan Depok viral di media sosial (medsos). Aksi mereka awalnya muncul dalam unggahan video pada Sabtu (3/10/2026). Dalam video tersebut, terlihat sejumlah pria berada di dalam sebuah ruangan remang-remang disertai lampu gemerlap. Salah satu di antaranya tampak memegang botol yang diduga sebagai alat pengisap sabu (bong).Terlihat mereka juga berjoget diiringi dentuman musik yang kencang.

Selanjutnya, polisi mengungkap satu pegawai rutan diduga menyediakan sabu, sementara pegawai lainnya diduga menyediakan alat musik yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Keduanya masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut, meski hasil tes urine dinyatakan negatif.

Sibarani memuji langkah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) bersama kepolisian dalam menindaklanjuti kasus tersebut. Proses pemeriksaan menjadi kesempatan untuk mengungkap fakta secara utuh sekaligus memperkuat pencegahan agar kejadian serupa tidak berulang.

Peristiwa tersebut, tegas Sibarani, menjadi bagian dari perhatian DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap tata kelola pemasyarakatan, termasuk pemeriksaan barang, pengawasan petugas, serta pengendalian akses keluar-masuk rutan.

Pengawasan, kata dia, tidak boleh baru bergerak setelah ada kejadian atau video yang viral. Setiap kasus mesti menjadi bahan evaluasi. "Kalau ada celah, kita perbaiki. Kalau ada prosedur yang perlu diperketat, kita perkuat," imbuh politisi Golkar ini.

Senada, Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira mendesak sanksi tegas berupa pemecatan terhadap oknum petugas rutan yang diduga terlibat pesta narkoba jenis sabu bersama Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Kasus pelanggaran di rutan akan terus berulang akibat keterlibatan oknum petugas internal, baik secara langsung maupun tidak langsung. "Pembenahan di lingkungan rutan dan lapas perlu dilakukan secara sistemik dan menyeluruh," kata dia di Jakarta, Kamis (8/10/2026). ■ TIF